

ANALISIS VIDEO

Mata Kuliah	: Pendidikan Kewarganegaraan
Program Studi	: S1 PGSD
Kelas	: 2F
Dosen Pengampu	: 1. Roy Kembar Habibi, M.Pd. 2. Drs, Rapani, M.Pd.

Nama : Siti Kholifah

NPM : 2413053194

Prodi : PGSD

SUPREMASI HUKUM (bagian 1)

Tema: Penegakan hukum yang berkeadilan

Demokrasi dan Demokratisasi dengan momentum yang memuncak seiring masa reformasi memberikan pekerjaan rumah yang besar kepada hukum. Demokrasi tersebut tidak bisa diatasi oleh dan cara hukum pada masa lalu di bawah kekuasaan yang otoriter dan sentralistik. Tuntutan partisipasi dan kontrol oleh masyarakat serta badan institusi menjadi semakin menguat dari tiga Lembaga negara yaitu:

- Legislatif
- Eksekutif
- Yudikatif

Semboyan Bhineka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini bisa menjadi tuntunan yang dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Pada masa lalu sentalisme dan otoriter telah menenggelamkan Bhineka Tunggal Ika.

Plurarisme dalam ber hukum muncul sebagai tantangan. Usaha untuk menyejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan, pengangguran, dsb berkaitan dengan roda perekonomian. Hukum perlu diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian. Bahkan para investor akan lebih dahulu menginginkan adanya pemaparan infrastruktur hukum sebelum melihat unsur yang lain. Hukum harus dapat diandalkan untuk mengamankan investasi.

QUOTES yang dapat menjadi panduan dalam Supremasi Hukum.

“Pertahanan kita bukanlah alat-alat perang, bukan sains, dan bukan pula bersembunyi di ruang bawah tanah. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan”. (Albert Einstein).

Jadi dari Video ini dapat saya simpulkan bahwa Penegakan hukum yang berkeadilan sangat penting untuk menciptakan demokrasi yang sehat dalam kehidupan berbangsa yang harmonis di tengah-tengah pluralisme di Indonesia. Setelah reformasi, banyak orang berharap sistem hukum akan menjadi lebih jelas, terlibat, dan mampu mempertimbangkan berbagai kepentingan tanpa menggunakan kekerasan seperti di masa kekuasaan otoriter. Ketiga lembaga negara yaitu: legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus bekerja sama untuk membangun supremasi hukum yang menjamin keadilan dan mendorong investasi, pertumbuhan ekonomi, dan keamanan sosial. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga harus digunakan sebagai landasan untuk membangun hukum yang inklusif dan menjunjung tinggi keberagaman.